

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pantai Gading atau Ivory Coast atau Cote d'Ivoire (dalam bahasa Perancis) merupakan salah satu negara di Benua Afrika. Tepatnya berada di Teluk Guinea, Afrika Barat, diantara Ghana dan Liberia. Pada awalnya pantai Gading adalah suatu perkampungan yang sangat terisolir dan didiami tak kurang dari 60 suku. Dahulu Pantai Gading merupakan negara yang dijajah Perancis, meskipun pada awalnya Pantai Gading ditemukan oleh Pedagang Portugis dan Perancis namun Perancis lah yang kemudian memenangkan pendudukan atas tanah Pantai Gading. Kemudian pada 7 Agustus 1960 Pantai Gading memperoleh kemerdekaan dari Perancis.

Setelah lepas dari kolonisasi Perancis, Pantai Gading menjadi sebuah negara merdeka dan tampil dengan kekuatan dan kedaulatan sebagai sebuah negara dalam percaturan politik internasional. Untuk mendapatkan kekuatan dan kedaulatan tersebut Pantai Gading mengalami hal yang tidak mudah untuk membuat perubahan dalam masyarakat post – kolonial yang mantap dan mampu berkembang secara mandiri. Sejak itu, Pantai Gading mengalami sejarah panjangnya sebagai sebuah negara.

Dengan luas wilayah 322,460 km persegi lebih besar dari wilayah New Mexico, Pantai Gading memiliki lebih dari 16 kelompok etnik dan

agama yang terbagi sesuai dengan regional mereka.¹ Penduduk Pantai Gading berjumlah sekitar 17 juta jiwa yang terdiri dari suku asli Afrika 97% (Akan 42%, Gur/ Voltaiques 17%, Mende 27%, Krous 11%, dan lain – lain 3%). Agama mayoritas didominasi oleh Islam sebesar 40%, Kristen 30% dan penganut kepercayaan 30%. Dengan melihat keragaman masyarakat Pantai Gading yang didalamnya terdapat perbedaan Etnis, agama, rasial, suku yang cukup kompleks, hal ini membuat Pantai Gading menjadi negara yang memiliki kecenderungan sebagai negara rawan konflik. Perbedaan – perbedaan itulah yang menjadikan Pantai Gading sebagai sebuah negara yang dibangun dengan penuh pertikaian agama dan etnis.

Dalam sejarahnya, Pantai Gading dipenuhi dengan konflik – konflik yang cukup krusial. Mulai dari issue penting seputar pemberontakan yang terjadi pada regim Henrie Konan Bedei oleh pemimpin pemberontak Jendral Robert Guei dan pemberontakan dari kelompok muslim utara pada regim Gbagbo. Sampai dengan konflik politik yang mengatas namakan agama dan etnis.

Konflik yang terjadi mengakibatkan kondisi ekonomi dan politik di Pantai Gading menjadi tidak stabil. Penghasilan rakyat Pantai Gading menurun dan pemasukan bagi kas negara jauh berkurang. Kerugian ini berujung pula pada kesengsaraan rakyat Pantai Gading. Kedamaian dan

¹ Cristian P, Potholm, , *Four African Political System*, Prentice-Hall, (New Jersey: 1970) hal. 230

perubahan menuju masyarakat post – kolonial yang mampu berkembang secara mandiri ini menjadi sia – sia oleh konflik yang berkepanjangan ini.

Pantai Gading mengalami konflik multi dimensi yang kemudian berkembang menjadi perang sipil dan menelan lebih dari 400 korban yang tidak bersalah.² Mengingat Pantai Gading merupakan penghasil utama coklat dan kopi di dunia yang kemudian di ekspor ke negara – negara konsumen, maka permasalahan konflik yang melibatkan warga sipil yang tidak bersalah ini banyak mendapatkan reaksi dari negara – negara konsumen tersebut. Reaksi – reaksi positif yang berupaya untuk membantu menyelesaikan konflik multi dimensi ini.

Laurent Gbagbo yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2000 dan mengetahui kesengsaraan rakyatnya pada regim Bedie akibat kudeta Guei berusaha untuk tidak mengulang sejarah dengan konflik yang sama. Berbagai upaya dan perundingan dilakukan untuk menghindari munculnya pemberontakan baru. Namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena pada September 2002 terjadi pemberontakan yang kedua kalinya di pantai Gading oleh kelompok pemberontak baru yang tidak puas dengan pemerintahan Gbagbo.

Konflik semakin memanas dengan adanya perebutan kekuasaan dan politik antar berbagai pihak yang melibatkan kepentingan agama dan etnis

² *Lebih Dari 400 Orang Terluka dalam Rusuh di Pantai Gading*, swamerdeka, 2004, dikutip tanggal 15 November 2006, dari: <http://www.suamerdeka.com/harian/0411/10/int04.htm>

antara kelompok pendatang yang mayoritas umat Islam dengan penguasa yang didominasi oleh umat Kristen. Tampuk pemerintahan yang dipegang oleh umat Kristen membuat umat Islam di Pantai Gading harus berjuang keras untuk dapat mewujudkan impiannya memimpin Pantai Gading. Keberadaan umat Islam di Pantai Gading justru mendapatkan perlakuan yang tidak sama, mereka ditetapkan sebagai warga kelas dua karena dinilai sebagai bukan trah asli Pantai Gading. Adanya diskriminasi terhadap Umat Islam oleh Umat Kristen terus berlanjut. Permasalahan perbedaan trah asli dan warga nomor dua pun memicu kepada konflik serius. CIA Worldfact menyatakan bahwa penduduk Pantai Gading sebanyak 40% menganut agama Islam, 30% Kristen, dan 30% lainnya menganut aliran kepercayaan, hal ini berbeda dengan pemerintah Pantai Gading yang menyatakan bahwa 60% penduduknya beragama Islam, 20% beragama Kristen dan sisanya menganut aliran kepercayaan. Namun Imam Brahima tidak sepakat dengan angka-angka itu, terutama jumlah umat Muslim yang dikatakannya lebih besar dari persentase tadi. Menurutnya, di wilayah Selatan, banyak pemeluk Islam yang terpaksa menjalankan agamanya secara diam-diam demi menghindari tindak kekerasan terhadap mereka.³

Konflik multi dimensi yang terjadi di Pantai Gading ini menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Penulis menilai kasus ini

³ Chamzawi, *Islam di Pantai Gading*, yarsi, 2005, dikutip tanggal 18 Oktober 2006, dari http://www.yarsi.ac.id/kolom_chamzawi/detail.php.id=31

akan mengancam kelanjutan hidup Pantai Gading sebagai negara dan juga membahayakan proses rekonsiliasi politik bagi negara – negara di Afrika Barat. Penulis juga menilai, hal ini menarik untuk dikaji untuk mengetahui sebab – sebab terjadinya konflik tersebut dan jalan keluar perdamaianya.

Tulisan ini mengangkat konflik berkepanjangan yang terjadi di Pantai Gading sebagai wujud pengaplikasian untuk menambah wawasan dalam masalah konflik yang rentan dengan kekerasan dan perpecahan. Dengan berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul: **Sebab – sebab terjadinya konflik di Pantai Gading** untuk penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengaplikasikan berbagai macam sisi teoritis yang didapat dan dipelajari selama perkuliahan.
- b. Untuk menjelaskan sebab – sebab terjadinya konflik berkepanjangan di Pantai Gading
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pantai Gading adalah negara yang terkenal dengan sumber ketenangan di wilayah Afrika bagian barat, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang

selalu meningkat. Walaupun di Era 80-an negara – negara Afrika yang lain mengalami penurunan tingkat perekonomian yang cukup signifikan, tetapi pendapatan penduduk Pantai Gading tetap seimbang sesuai dengan tingkat kemakmuran mereka.⁴

Setelah merdeka dari Perancis tanggal 7 Agustus 1960, presiden pertama Pantai Gading adalah Felix Houphouët Boigny yang dipilih oleh rakyatnya lewat Pemilihan Umum yang diadakan lima tahun sekali. Bagi rakyat Pantai Gading, Boigny adalah “Spiritual Father” karena mampu memahami kondisi dan ekonomi negara tersebut dengan baik. Beliau juga mampu menjalin persaudaraan yang dekat dengan Perancis sebagai kekuatan koloni mereka.⁵ Kemampuan dan kecakapan Boigny dalam memainkan peran aktor politik menghasilkan respon positif dari negara lain untuk membina hubungan baik dengan Pantai Gading. Boigny juga mampu membina hubungan baik dengan Amerika, dalam hal ini keterlibatannya dalam IMF.

Presiden Boigny berusaha memahami rakyat Pantai Gading yang memiliki lebih dari 60 etnis, dan beberapa Agama dengan kepentingan mereka masing – masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antar etnis yang didalamnya melibatkan unsur agama yang cenderung diakibatkan oleh

⁴ *History of Ivory Coast; Introduction*, global-security, 2005, dikutip tanggal 15 Oktober 2006, dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2005.htm>

⁵ *Country Profile; Ivory Coast*, allafrika, 2002, dikutip tanggal 9 November 2006, dari: <http://www.allafrika.com>

kepentingan masing – masing kelompok yang didasarkan atas agama, nasionalisme, dan regional mereka.

Selama 30 tahun, sejak kemerdekaan tahun 1960 sampai dengan tahun 1990 Boigny melaksanakan sistem pemerintahan “One Party”. Beliau mendirikan PDCI (Democratic Party of Cote d’Ivoire) pada tahun 1946 dan memiliki pendukung yang cukup banyak. Regim Felix Houphouet Boigny yang otoriter mampu bertahan sampai dengan tahun 1993.

Pada awal tahun 90-an dan seterusnya, sistem politik Pantai Gading mulai melaksanakan sistem multi partai. Demokratisasi mulai ditumbuhkan dengan munculnya protes dan demonstrasi sebagai wujud mobilisasi rakyat yang menginginkan tuntutan mereka dipenuhi. Hal ini pula terpetakan dalam proses pemilihan Umum di Pantai Gading yang mulai memunculkan banyak partai didalamnya. Salah satu lawan politik yang terkuat dalam Pemilihan Umum tahun 1990 adalah Laurent Gbagbo yang berhasil merubah sistem partai dalam pemerintahan Pantai Gading. Dibawah kekuasaan Boigny yang selalu menjaga kepentingan masing – masing etnis dan agama, Pantai Gading merupakan wilayah yang aman dan tidak memiliki kekacauan yang berarti. Namun konflik – konflik dan perang antar etnis maupun agama mulai muncul pada masa kepemimpinan penguasa – penguasa setelah Boigny.

D. Pokok Permasalahan

Mengapa Pantai Gading mengalami konflik berkepanjangan?

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menggambarkan fenomena konflik yang terjadi di Pantai Gading, dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa kerangka dasar pemikiran untuk mencoba mendefinisikan, membandingkan dan menggabungkan teori – teori tersebut sehingga ada batasan yang representatif. Untuk menentukan batasan penelitian tersebut penulis perlu mengetahui unit analisa dari bahasan. Dalam hal ini Pantai Gding merupakan negara bangsa yang berarti dalam level of analysis ilmu hubungan internasional berada dalam level ketiga.

1. Teori Konflik

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran – sasaran yang tidak sejalan.⁶ Dalam konflik di Pantai Gading, heterogenitas ras, agama dan etnis yang ada didalamnya dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda dapat menimbulkan gesekan – gesekan yang berujung pada konflik.

⁶ Dari Chris Mitchell, *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London, 1981, Bab 1 dalam *Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Simon Fisher, dkk, terj. S. N. Kartikasari, dkk, The British Council Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 4

- e. Konflik Pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh satu negara untuk “membebaskan” rakyat negara lain, biasanya karena alasan – alasan etnis atau ideologis.
- f. konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah

Dengan melihat sumber konflik diatas, maka konflik yang terjadi di Pantai Gading berhubungan dengan sumber konflik nomor dua, yaitu komposisi pemerintah. Adanya upaya untuk menjatuhkan regim yang sedang berkuasa dan menggantinya dengan pemerintahan yang cenderung menguntungkan pihak yang melakukan intervensi dilakukan oleh Jendral Robert Guei pada bulan Desember 1999. Aksi kudeta yang melibatkan kekerasan militer ini telah menimbulkan konflik antara pemerintah dan pihak pemberontak. Dengan menggunakan kekuatan militer sebagai sarana pemberontakannya Guei berhasil menggulingkan pemerintahan Henrie Konan Bedie.

Setelah berhasil menguasai pemerintahan Bedie, Guei melakukan berbagai upaya untuk dapat tetap berkuasa. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah dengan menghalangi semua orang yang mungkin akan mengancam keberhasilan rencananya. Seperti yang dilakukannya pada Perdana Menteri Alassane Dramane Quattara seorang muslim pemimpin partai oposisi. Guei mengeluarkan peraturan – peraturan baru untuk mencegah Quattara agar tidak menghalangi rencananya dalam mendapatkan kursi presiden.

Hal yang sama yang terjadi pada pemberontakan tahun 2002 dalam regim Gbagbo. kelompok pemberontak utara akhirnya melakukan kudeta untuk dapat mengembalikan hak – hak serta kepentingannya. Gbagbo yang dinilai terlalu ingin berkuasa dan mendominasi kekuasaan dengan menggunakan kartu etnik, membuat pemberontakan berdarah yang melibatkan banyak korban.

Menurut David E. Apter, masyarakat yang penduduknya tidak homogen tetapi terbagi dalam kelompok – kelompok suku, etnik, rasial, dan agama (masyarakat plural) seperti yang sering terjadi, beberapa dari faktor – faktor ini meningkatkan kecenderungan kearah konflik dari pada kompromi.⁸

Dari pernyataan ini, dapat kita ketahui bahwa David E. Apter melihat bahwa dalam suatu masyarakat yang multi etnis selalu terdapat kecenderungan – kecenderungan yang dapat menimbulkan gesekan – gesekan ataupun letupan – letupan antar etnis yang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya akan dapat mengakibatkan pecahnya suatu konflik etnis. Sedangkan kompromi ataupun perundingan hampir sama sekali tidak berpeluang menyelesaikan masalah ataupun letupan – letupan yang muncul. Kalaupun bisa, itu hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu sebab yang dominan dalam konflik antar etnik menurut David E. Apter adalah karena adanya kelompok – kelompok yang terbagi berdasarkan suku, ras, agama dan bahasa.

⁸ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta 1998, hal. 294.

Persaingan – persaingan yang ada kemudian muncul di Pantai Gading dari kelompok imigran di Utara yang merasa tertindas dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok pemerintah. Dominasi politik dan kartu etnik yang memainkan isu kewarganegaraan yang terjadi di Pantai Gading telah memicu konflik yang memecah belah negara tersebut menjadi dua kelompok besar. Berawal dari tidak terpenuhinya kebutuhan akan politik yang dirasakan kelompok pendatang di wilayah utara telah menyulut pertikaian politik tersebut ke arah perpecahan etnis yang juga melibatkan faktor agama.

2. Nasionalisme

Nasionalisme sebagai sebuah gejala sosial massal, dapat meningkatkan solidaritas dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, selain juga dapat menimbulkan permusuhan, pemilahan, ketegangan, dan perang diantara kelompok nasionalis atau negara yang bertentangan.

Nasionalisme adalah semangat memiliki bersama, atau sifat dari keinginan berusaha mempertahankan identitas kelompok dengan melembagakan dalam bentuk sebuah negara. Nasionalisme dapat diperkuat oleh ikatan persamaan ras, bahasa, sejarah, agama, dan nasionalisme selalu terpaut dengan wilayah tertentu. Konsep nasionalisme dapat juga dianggap sebagai sebuah fungsi kemampuan sekelompok masyarakat tertentu untuk berkomunikasi diantara mereka dengan lebih baik dibanding kelompok

masyarakat lainnya. Fenomena nasionalisme dapat diterangkan sebagai gejala unik yang membedakan sekelompok masyarakat dari kelompok lainnya. Nasionalisme pertama kali dikembangkan di Eropa Barat melalui pengkonsolidasian unit politik feodal yang berdiri sendiri kedalam kerajaan; dan pada masa revolusi Perancis serta perang Napoleon, nasionalisme diidentifikasi sebagai keinginan rakyat biasa untuk berbangsa dan bernegara.¹⁰

Nasionalisme merupakan suatu kelompok kolektif yang secara emosional mengikat banyak orang menjadi suatu bangsa. Unsur – unsur terkuat dalam spektrum politik nampaknya sepakat bahwa etnik merupakan identitas tertinggi. Di Pantai Gading, etnis – etnis besar yang merupakan trah asli seperti Akan dan Mende menguasai struktur negara baik dibidang militer maupun birokrasi pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok pendatang yang bukan trah asli Pantai Gading juga memiliki identitas etnik yang ingin mereka tonjolkan sebagai salah satu wujud nasionalisme mereka sebagai warga Pantai Gading yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga lainnya. Diskriminasi terhadap umat Islam (kaum pendatang) sebagai warga yang bukan trah asli Pantai Gading dapat memicu munculnya identifikasi kelompok yang cenderung memaksa dan

¹⁰ Jack J. Plano, Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terj. Wawan Juanda, Putra A. Bardin (1999), hal. 29

menghasilkan sebuah konflik yang diklasifikasikan secara garis besar sebagai berikut:¹¹

- a. Konflik – konflik nasionalisme, meliputi perselisihan antara kelompok etnik, rasial, agama, dan kelompok berbahasa sama yang merasa dirinya sebagai bangsa. Nasionalisme etnik menimbulkan kesadaran diri sendiri maupun kesadaran berekspresi untuk kepentingan sendiri.
- b. Konflik – konflik kelas, meliputi masalah – masalah yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi.
- c. Konflik – konflik lain yang penyebab utamanya bukan bentrokan antar kelompok identitas maupun kelas.

Konflik yang terjadi antara kelompok pemberontak yang mayoritas umat Islam di wilayah utara dan umat Kristen yang mendominasi pemerintahan (kaum minoritas) di wilayah selatan Pantai Gading lebih ditunjukkan oleh konflik nasionalisme yang didasari oleh konflik politik dalam hal ini perebutan kekuasaan dan meliputi perselisihan antara kelompok agama, yang dalam hal ini umat Islam sebagai kaum mayoritas di Pantai Gading mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak – haknya sebagai warga negara. Sebagai pemegang kekuasaan, kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh umat kristen selalu menyulitkan dan menempatkan umat Islam dalam posisi yang tidak menguntungkan. Konflik politik yang

¹¹ *Op cit.*, hal. 183

juga melibatkan masalah etnis antara kelompok pendatang dan penduduk asli Pantai Gading.

Dibidang pemerintahan dan politik, Gbagbo banyak melakukan tindakan yang memicu ketegangan antara kelompok – kelompok etnik atau suku dengan mengutamakan faktor keagamaan. Diskriminasi atas penduduk imigran yang mayoritas adalah muslim dan penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen mulai ditetapkan, sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi rakyat Pantai Gading. Bahkan sebelum pemerintahan Gbagbo, Bedie memiliki kesempatan besar untuk memonopoli pemerintahan Pantai Gading. Bedie mampu bertahan selama dua kali pemilihan Umum dengan memenangkannya berturut – turut, namun kesempatan para lawan politiknya terbatas karena adanya upaya pertahanan yang dilakukan Bedie untuk menghalangi lawan politiknya terpilih sebagai presiden.

Contoh konkrit yang memicu kemarahan umat Islam adalah adanya larangan dari pemerintah Pantai Gading terhadap Perdana Menteri Alassane Ouattara yang seorang muslim untuk ikut dalam Pemilihan Umum tahun 2000. Pembatasan ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi bagi para pendukung Ouattara. Mayoritas muslim utara banyak melakukan protes yang menentang kebijakan Bedie tersebut. Bedie memainkan kartu etnis yang didalamnya terdapat faktor agama sehingga menimbulkan ketegangan antar etnik, dimana Bedie masuk dalam kelompok Kristen selatan.

3. Struktur Politik

Dalam sosiologi politik, studi tentang kekuasaan tidak hanya berkisar pada negara bangsa saja, namun juga dikaji melalui pengelompokan manusia. Karena setiap kelompok manusia ini dapat menjadi struktur yang menjadi kerangka acuan (framework) tempat terjadinya konflik dan integrasi. Yang pertama, struktur politik adalah pengelompokan sosial yang berbeda – beda.¹² Artinya, dalam manusia terdapat berbagai kategori yang mana setiap kategori mewakili jenis politik tertentu. Dapat pula didasarkan pada unsur – unsur berbeda yang ada dalam semua komunitas manusia secara geografis, demografis, teknologis kelembagaan, kultural, dan lain sebagainya. Yang membedakan hanyalah dalam klasifikasi.

Penggolongan struktur politik dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah secara vertikal dimana setiap komunitas di definisikan sebagai kombinasi dari unsur yang berbeda – beda. Yang kedua adalah penggolongan secara horizontal, yaitu setiap unsur muncul dalam berbagai jenis komunitas. Dengan demikian, struktur politik dapat dibagi dalam dua klasifikasi besar yaitu struktur fisik dan struktur sosial. Istilah fisik lebih cenderung pada geografi dan demografi (alam), sementara istilah sosial lebih mengacu pada faktor – faktor yang lebih artifisial dan secara hakiki manusiawi (teknologi, lembaga, kebudayaan, keyakinan)

¹² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 hal. 33

a. Struktur Fisikal

komunitas manusia yang lebih terikat pada wilayah geografik, seperti suku – suku tertentu yang hanya bergerak dan berkisar dalam wilayah – wilayah tertentu. Kelompok suku tersebut akan memiliki sifat – sifat yang berbeda – beda. Fenomena kekuasaan sangat dipengaruhi oleh struktur fisikal dimana mereka berada, hal tersebut juga dapat berupa sikap antagonis untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Struktur fisikal terdiri dari:

- a.1 Struktur Geografis (fenomena politik tergantung pada kondisi – kondisi geografis yang berupa iklim, letak wilayah, dan sumber daya alam yang dimiliki)
- a.2 Struktur demografis (fenomena politik tergantung pada jumlah penduduk yang makropolitik atau mikropolitik, dan komposisi penduduk)

b. Struktur Sosial

Struktur sosial ini adalah hasil buatan manusia, dalam hal ini bukan bentukan alam. Struktur sosial meliputi kebudayaan, teknologi, doktrin, regim, dan hubungan kolektif. Dalam hal ini struktur sosial lebih ditekankan pada Entitas Kultural.

Entitas Kultural adalah semua unsur yang membentuk suatu komunitas unsur geografis, demografis, teknologi, keyakinan, dan citra rakyat yang menjadi satu dan membentuk kombinasi yang berbeda.

Konsep diatas dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi di Pantai Gading. Konflik yang muncul dapat dikategorisasikan dengan struktur politik yang terdiri dari letak, agama, sumber daya alam, komposisi penduduk, akses politik dan militer. Kondisi Pantai Gading yang terpecah menjadi dua yaitu *mayoritas utara* dan *minoritas selatan* yang didasarkan pada perbedaan suku dan agama. Entitas Kultural juga mewarnai konflik dengan perbedaan yang mendasar pada setiap penduduk di Pantai Gading. Sehingga dominasi oleh kaum minoritas sebagai penguasa terhadap kaum mayoritas di utara mengakibatkan terjadinya konflik.

Struktur fisik dan sosial tersebut selain berpengaruh terhadap perkembangan politik masyarakatnya, juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya. Wilayah geografis yang lebih baik dan sistem ekonomi yang tertata rapi memungkinkan tingkat perekonomian tumbuh dan meningkat.

Terpecahnya wilayah Pantai Gading menjadi dua juga berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Apalagi diitunjang dengan perbedaan struktur politik yang jelas. Sebagai kaum yang mendominasi sumber – sumber ekonomi, maka pemenuhan kebutuhan kelompok selatan sebagai penguasa jauh lebih terpenuhi dibandingkan dengan kelompok mayoritas utara. Perbedaan kesenjangan ekonomi ini pula memicu adanya konflik yang terus muncul di Pantai Gading.

F. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan yang muncul dan didukung oleh kerangka dasar teori yang penulis gunakan, maka penelitian ini akan dimulai dengan hipotesa sebagai berikut. Pantai Gading masih mengalami konflik yang berkepanjangan walaupun sudah menerapkan sistem multi partai karena:

1. Adanya dominasi politik oleh kaum minoritas selatan sebagai penguasa terhadap kaum mayoritas utara.
2. Dinamika identitas nasional yang memicu masalah nasionalisme
3. Ketimpangan struktur politik yang berimbas pada masalah entitas kultural dan ketimpangan ekonomi di Pantai Gading

G. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi di Pantai Gading ini, penulis memberikan batasan waktu penelitian dimulai pada tahun 1995 pada saat pemilihan umum dengan sistem multi partai pertama dilakukan setelah sebelumnya Boigny menerapkan sistem "One Party".

Dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 terjadi serangkaian pemberontakan yang memicu ketidak stabilan sosial dan politik di Pantai Gading. Kemudian tahun 2000 terjadi upaya penggagalan pemilu yang memunculkan kecemburuan sosial dari umat Muslim karena dilarangnya Alassane Dramane Quattara untuk menjadi kandidat presiden di Pantai Gading. Konflik berangsur mereda dengan diupayakannya berbagai macam

perundingan dan datangnya pasukan perdamaian ke Pantai Gading dari negara lain untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Namun, konflik kembali memanas dan bertambah parah ketika Gbagbo mulai melanggar kesepakatan – kesepakatan perdamaian dan tetap menjalankan pemerintahan dengan sistem marginalisasi yang tetap memecah Pantai Gading menjadi dua, Utara dan Selatan, Muslim dan Kristen. Situasi kembali memanas, dan konflik masih terus berkecamuk hingga akhir masa jabatan Gbagbo sekitar tahun 2005.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan membahas fenomena – fenomena yang terjadi pada kurun waktu sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam jangkauan penelitian tersebut selama hal itu masih relevan dengan masalah diatas.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis muatan (content analysis) sebagai teknik pengumpulan data. Analisis muatan didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack (1982) sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Yaitu dengan mempelajari pidato – pidato baik yang diucapkan maupun yang tertulis. Disini dapat dilakukan penghitungan kata – kata yang menunjukkan persetujuan atau ketidak setujuan atas suatu obyek tertentu. Atau juga dapat dilakukan analisis atas intensitas sikap yang terkandung dalam ungkapan – ungkapannya. Bahan yang dijadikan sumber

data untuk analisis muatan tidak hanya bahan pidato tetapi juga dapat berupa buku harian, surat, catatan kasus dan sebagainya.¹³

I. Sistematika Penulisan

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II, Menjelaskan tentang gambaran Pantai Gading secara umum yang meliputi sejarah Pantai gading Pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kondisi wilayah, dan kondisi pemerintahan yang meliputi perekonomian dan politik Pantai Gading setelah menganut sistem Multi Partai.

Bab III, Memberikan fakta – fakta tentang konflik yang terjadi di Pantai Gading, dengan adanya beberapa kali kudeta oleh pihak pemberontak, dan upaya pengagalan Pemilu tahun 2000. dijelaskan pula fakta – fakta ketimpangan kekuasaan yang terjadi di Pantai Gading.

Bab IV, Berisi penjelasan tentang sebab – sebab konflik di Pantai Gading setelah diterapkannya sistem Multi Partai.

Bab V, berisi kesimpulan dari Bab I sampai dengan Bab IV

¹³ Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya (Bandung : 1998) hal. 72